

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pengaturan pengawasan ketenagakerjaan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan pada sektor informal, apakah hukum nasional tentang pengawasan ketenagakerjaan sudah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sektor informal dan bagaimanakah pengaturan pengawasan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal sebagai hukum masa akan datang yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskriptif, sistematis dan eksplansi terhadap isu hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan hukum serta analisis sinkronisasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal karena tidak terdapat pengaturan khusus terkait pengertian dan substansi pekerja sektor informal sehingga menjadi multitafsir dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang ada belum menyentuh perlindungan hukum bagi pekerja disektor informal, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum dibidang ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dengan mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, dengan cara menerbitkan regulasi yang mewajibkan semua pekerja dan pemberi kerja sebelum melaksanakan pekerjaan wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis, dan perjanjian tersebut wajib di daftarkan hal mana ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja sektor informal, disamping itu guna memberikan kemanfaatan hukum oleh karena jumlah pegawai pengawas yang terbatas maka kedepan perlu dibuat regulasi terkait dengan *e-lapor* pekerja formal yang terintegrasi dengan serikat pekerja formal dan layanan *e-pengaduan* ketenagakerjaan yang dapat memberikan akses bagi pekerja baik pada lapangan sektor formal maupun informal, serta guna memberikan rasa keadilan bagi pekerja sektor informal dalam pemenuhan hak-hak pekerja sektor informal perlu disusun regulasi yang berkaitan pengaturan penerapan asas proporsionalitas, yaitu suatu kegiatan untuk mengawasi dan menegakkan hukum ketenagakerjaan yang perwujudannya disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dari subjek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Artinya proporsionalitas pada beban pikul dalam mewujudkan hak dan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek hukum (tidak setara), di samping itu pemerintah juga perlu untuk mengatur terbentuknya serikat-serikat pekerja berdasarkan jenis pekerjaannya, serta menerbitkan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah terkait dengan standar upah minimum bagi pekerja sektor informal sesuai dengan jenis-jenis pekerjaannya masing-masing.

Kata Kunci: Pengawasan, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Pekerja, Sektor Informal.

**LABOR SUPERVISION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION
FOR INFORMAL SECTOR WORKERS IN LABOR LEGAL
PERSPECTIVE INDONESIA.**

ABSTRACT

This study aims to find out how the regulation of labor inspection in the perspective of labor law in the informal sector, whether the national law on labor inspection has been able to provide legal protection for the rights of informal sector workers and how the regulation of labor inspection as a form of legal protection for informal workers as a future law. who can provide justice, benefit and legal certainty? This research uses a normative method with descriptive, systematic and explanatory steps towards positive legal issues in depth using a conceptual approach, a law approach, a comparative law approach and a systematic synchronization analysis. The results of the study show that the applicable legal regulations do not explicitly regulate the regulation and legal protection of workers for the informal sector because there are no specific regulations related to the substance of informal sector workers so that they have multiple interpretations in their implementation. Existing arrangements have not touched legal protection for workers in the informal sector, it is necessary to carry out work in the field of manpower, especially those related to legal supervision, legal benefits and justice, by issuing regulations that require all workers and employers to carry out work required to make written agreements, and the agreement must be registered which is important to provide legal certainty for informal sector workers, in addition to providing legal benefits due to the limited number of supervisory employees, in the future it is necessary to make regulations related to formal worker e-reports that are integrated with trade unions formal and e-employment complaint services that can provide access for workers in both the formal and informal sectors, as well as provide a sense of justice for informal sector workers in fulfilling the rights of informal office workers, it is necessary to formulate regulations relating to employment. application as proportionality, which is an activity to supervise and the law that makes it happen is adjusted to the level of ability of the subject in carrying out rights and obligations. This means that the proportionality of the burden in realizing rights and obligations in accordance with the limits of the ability of each legal subject (not equal), in addition, the government also needs to regulate the formation of trade unions based on the type of work, as well as issue legal rules in the form of Regional Regulations related to standards. the minimum wage for informal sector workers according to their respective types of work.

Keywords: *Supervision, Employment, Legal Protection, Workers, Sector Informal.*